

# KUASA BAHASA TERHADAP SASTRA, SEJARAH, DAN WACANA KEKUASAAN

---

Nurhadi  
PBSI FBS Universitas Negeri Yogyakarta  
nurhadi2@yahoo.co.id

---

## Abstrak

Dalam berbagai aspek, bahasa memiliki peran tersendiri yang seringkali bersinggungan dengan kekuasaan. Pemakaian tiga huruf dalam konteks frase G-30-S-1965/PKI menjadi daya tarik menarik antara berbagai pihak yang berkepentingan dalam penulisan sejarah Indonesia. Ada sejumlah pihak yang berusaha mengukuhkan tiga kata terakhir itu untuk tetap eksis dalam rangkaian istilah tersebut, di lain pihak ada sejumlah kelompok yang ingin menghapusnya. Penulisan sejumlah karya sastra seperti *Anne Frank* yang terkait dengan *holocaust*, penulisan sejarah tentang *knight templar* dalam sejarah abad pertengahan Eropa, ataupun kajian tentang wacana orientalisme yang menempatkan Barat sebagai pihak dominan terhadap Timur yang subordinat, merupakan aspek-aspek yang terkait dengan sebuah sistem kekuasaan. Kekuasaan yang dibangun oleh sejumlah konstruksi bahasa. Sastra, sejarah, dan wacana kekuasaan tidak lain adalah pilar-pilar yang terbangun atas peran bahasa sebagai ranah kekuasaan.

**Kata-kata kunci:** bahasa, sejarah Indonesia, holocaust, sastra, dominasi, kekuasaan

-1-

Pelarangan buku di Indonesia masih terjadi pada masa reformasi, tidak hanya pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Ketika sejumlah buku yang terkait dengan G-30-S 1965 dilarang, biasanya terjadi pada masa pemerintahan Soeharto. Meski demikian, setelah melewati masa reformasi, pelarangan serupa juga masih terjadi. Juga terhadap buku yang masih terkait dengan peristiwa tersebut. Buku yang dimaksud adalah *Dalih Pembunuhan Massal Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto* karya John Rosa pada penghujung 2009.

Sebetulnya ada lima buku yang dilarang pada tahun tersebut. Selain buku John Rosa, buku lainnya berjudul: *Lekra Tak Membakar Buku: Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakyat 1950—1965* (karya Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M Dahlan), *Suara Gereja bagi Umat Tertindas: Penderitaan Tetesan Darah dan Cucuran Air Mata Umat Tuhan di Papua Barat Harus Diakhiri* (karya Cocrates Sofyan Yoman), *Enam Jalan Menuju Tuhan* (karya Darmawan), dan *Mengungkap Misteri Keberagaman Agama* (karya Syahrudin Ahmad). Dua dari lima buku yang dilarang oleh pihak Kejaksaan Agung Indonesia ini terkait dengan PKI, yakni buku tentang Dalih Pembunuhan Massal dan buku tentang Lekra (Yusuf, 2012).

Sebelumnya, juga pada masa pemerintahan SBY, tepatnya pada 9 Maret 2007, Kejaksaan Agung juga melarang beberapa buku sejarah kurikulum 2004. Beberapa buku sejarah untuk SMP dan SMA tersebut secara resmi dilarang terbit dan dilarang beredar. Buku-buku tersebut antara lain berjudul *Kronik Sejarah untuk SMP* (karya Anwar Kurnia), *Sejarah I untuk SMA* (karya TB Purwanto, dkk), dan sejumlah buku lain yang mengacu pada kurikulum 2004. Buku-buku tersebut dilarang karena memuat peristiwa Pemberontakan PKI tahun 1948

dan 1965 yang hanya mencantumkan Gerakan 30 September tanpa menyebutkan keterlibatan PKI (Yusuf, 2012).

Tiga huruf tersebut, yakni PKI menjadi kata kunci yang sangat penting. Peningkaran penulisan kata G-30-S 1965 tanpa mencantumkan kata PKI di belakangnya merupakan suatu bentuk yang tidak diizinkan oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini pemerintah, termasuk juga pemerintah reformasi, pemerintahan pasca Orde Baru yang dilegitimasi sebagai rezim yang berbeda dengan Orde Baru. Meski demikian, faktanya sejumlah pelarangan sejumlah buku yang tidak mencantumkan keterlibatan PKI atau yang mengingkarinya dalam bentuk lain adalah sebuah pertarungan wacana yang cukup menarik. Dalam banyak bayangan orang, pemerintahan sekarang setidaknya cukup permisif terhadap hal itu. Meskipun pada kenyataan tidaklah demikian.

-2-

Versi resmi pemerintah Indonesia menyatakan peristiwa pembunuhan sejumlah jenderal Angkatan Darat oleh pasukan Cakra Birawa itu dikenal dan ditulis dengan istilah G-30-S 1965/PKI. Tidak dengan istilah lain, termasuk dengan istilah Gestok (Gerakan Satu Oktober) meskipun berdasarkan waktunya, istilah ini malah lebih dekat dengan fakta kejadian sebenarnya. Juga terhadap penulisan G-30-S 1965 tanpa tiga huruf di belakangnya yang mengaburkan pelaku penculikan tersebut. Tanpa kata PKI di belakangnya, peristiwa tersebut menjadi diambangkan penafsirannya. Pelakunya belum tentu PKI. Itulah tafsir sejarah. Juga termasuk penafsiran John Rosa (2008:xv—xxi) yang menganggap bahwa peristiwa penculikan tersebut menjadi dalih untuk melakukan pembunuhan massal yang lebih besar. Tentu saja penafsiran seperti ini berbeda dengan otoritas penafsiran sejarah resmi pemerintah Indonesia.

Setelah keran demokratisasi dibuka lebar sehabis masa reformasi, sejumlah wacana penafsiran yang berbeda terhadap pemerintah, khususnya terkait dengan peristiwa 1965 itu, sudah relatif terbuka. Sejumlah pihak yang mempertanyakan ataupun menolak terhadap tafsir sejarah peristiwa tersebut menulisnya dengan G-30-S 1965, tanpa menambahkan tiga huruf dengan urutan tertentu: PKI. Pihak yang berseberangan dengan pemerintah Indonesia ataupun yang mempertanyakan kebenaran “versi resmi” memang sengaja menanggalkan kata PKI sebagai tafsir peristiwa penculikan tersebut tidak dilakukan oleh PKI atau sejumlah tafsir lainnya yang terbuka, bukan seperti tafsir pemerintah. Begitulah pertarungan wacana itu terjadi.

Di balik penggunaan atau penambahan tiga huruf dengan susunan atau urutan huruf P, K, lalu I telah menjadi ajang pertarungan bahasa. Konsekuensinya bisa luar biasa. Seperti yang disampaikan oleh John Rosa dalam bukunya, pencantuman kata PKI dalam peristiwa itu menjadi legitimasi untuk melakukan pembunuhan yang jauh lebih besar lagi terhadap orang-orang PKI atau orang-orang kiri yang berseberangan dengan Soeharto. Menurut Anderson, jumlah korban tewas pasca G-30-S 1965/PKI mencapai 500 ribu orang. Coba bayangkan jika PKI memang tidak terlibat dalam penculikan itu, dosa seperti apa yang harus dilekatkan kepada pihak pembunuh massal ini? Pun kalau petinggi PKI pelakunya, mengapa “seluruh” orang PKI menanggung dosa para petinggi partainya?

Sejarah sudah terjadi. Baik penculikan tersebut maupun pembunuhan massalnya telah terjadi, telah menjadi sejarah. Akan tetapi, penafsiran terhadap hal tersebut masih terus

berlangsung. Tarik menarik antara pihak yang membenarkan keterlibatan PKI dengan pihak yang mempertanyakan atau menyangkal keterlibatan PKI masih berlangsung hingga kini, ketika rezim Orde Baru telah tumbang setidaknya 14 tahun. Pertarungan itu terjadi dalam berbagai skala dan habitus yang beragam. Mulai dari berbagai seminar, diskusi, penulisan buku, acara TV, dan lainnya termasuk dalam skala kecil penggunaan istilah: G-30-S 1965/PKI atau hanya G-30-S 1965. Ini tidak hanya sekedar pertarungan pemakaian tiga huruf tetapi konsekuensi di belakangnya: pemulihan nama baik orang-orang PKI hingga penamaan terhadap pelaku kejahatan kemanusiaan (jika kekuasaan wacana suatu ketika berbalik).

Di sinilah peran penting pemakaian bahasa. Penafsiran terhadap siapa yang terlibat dalam kasus penculikan sejumlah jenderal Angkatan Darat pada malam penghujung bulan September 1965, salah satunya ditentukan dengan tiga huruf yang terkait dengan istilah G-30-S 1965.

Tidak hanya itu, dalam sejumlah tulisan orang-orang yang menentang Soeharto atau setidaknya sebagai pihak yang mempertanyakan keligitimasian pemerintahannya, mereka menuliskan namanya secara khas. Penulis-penulis semacam ini tidak menuliskan presiden kedua Indonesia itu dengan ejaan lama tetapi dengan ejaan baru. Presiden yang naik kursi kepresidenan berkat peristiwa G-30-S 1965/PKI ini ditulis oleh pihak-pihak tersebut dengan "Suharto" bukan dengan "Soeharto". Ini kelihatan seperti persoalan yang sepele, seakan salah ketik belaka. Kalau ditelusuri secara lebih cermat, ada sebuah kesengajaan. Sebuah perlawanan tata tulis, sebuah perlawanan bahasa, perlawanan wacana yang lebih lanjut berujung pada perlawanan kekuasaan.

-3-

Peristiwa G-30-S 1965/(PKI) di Indonesia bukanlah sebuah anomali. Kalau kita tengok peristiwa pembantaian Yahudi dalam Perang Dunia II, khususnya di wilayah yang dikuasai Nazi waktu itu di bawah kepemimpinan Hitler yang dikenal dengan istilah holocaust akan dijumpai hal yang serupa. Holocaust dalam sejarah dianggap sebagai kejahatan kemanusiaan. Pembantaian etnis atau bangsa Yahudi dalam PD II di kamar gas tersebut sebagai bentuk genosida, pembantaian massal berdasarkan etnis atau bangsa tertentu. Konon, peristiwa holocaust inilah yang menjadi salah satu pilar penting pendirian negara Israel.

Di sini kita tidak membicarakan tentang peristiwa holocaust itu sendiri, atau membahas tentang benar tidaknya holocaust, atau lainnya. Pada poin ini hanya akan dibicarakan mengenai penafsiran tunggal yang dilakukan oleh pihak hegemonik dalam menafsirkan peristiwa pembunuhan massal tersebut. Mengapa pihak-pihak tertentu yang ternyata tidak hanya Israel tetapi juga negara-negara yang sepihak dengan Israel mengklaim versi "resmi" holocaust dengan tindakan-tindakan represif. Mengapa untuk peristiwa sejarah ini mereka tidak menerima penafsiran yang berbeda dengan penafsiran versi sejarah mereka?

Peristiwa holocaust menjadi perbincangan yang menghangat manakala Presiden Iran, Ahmadinejad, mempertanyakan kebenaran versi sejarah holocaust. Ahmadinejad mempertanyakan kebenaran sejarah holocaust. Karena tanpa holocaust, eksistensi Israel bisa dipertanyakan. Dengan adanya pengusiran warga Yahudi di berbagai wilayah pada PD II seolah menjadi legitimasi kepindahan orang-orang Yahudi ke wilayah Timur Tengah yang kini dikenal dengan

negara Israel. Ada yang beranggapan kalau PD I memang dicanangkan untuk menghasilkan wilayah atau tanah Israel dan PD II dicanangkan untuk menghasilkan penduduk di tanah Israel.

Menurut Yahya (2006:13), holocaust ini merupakan suatu topik yang penting. Kebiadaban Nazi dan tragedi kaum Yahudi yang menjadi korbannya telah digunakan sebagai alat politik sejak Perang Dunia II hingga kini. Untuk membenarkan kebijakan pendudukan dan terornya, dan membungkam kecaman yang terarah padanya, negara Israel terus bersembunyi di balik konsep holocaust. Sesungguhnya, berdirinya negara Israel sebagian besar dimungkinkan berkat dukungan dan simpati dunia yang diilhami konsep genosida itu. Meski demikian, kebijakan pemusnahan Nazi tak hanya ditujukan pada kaum Yahudi, namun juga pada etnis, kelompok agama dan kelompok etnis lain, seperti orang-orang gipsi, Polandia, Slavia, penganut Katolik yang taat, penganut Kesaksian Yehova (sebuah aliran agama Nasrani), serta para penyandang cacat fisik dan mental. Kini, holocaust seolah-olah hanya "milik" orang-orang Yahudi.

Lebih lanjut Yahya (2006:13) menyatakan bahwa kaum Yahudi, yang 5,5 juta orang di antaranya terbunuh di kamp-kamp konsentrasi, adalah korban terbanyak kebiadaban Nazi. Namun, sebenarnya, jumlah seluruh korban yang terbunuh di kamp-kamp itu mencapai lebih dari 11 juta orang, dan lebih dari setengah jumlah itu mencakup anggota bangsa-bangsa yang disebutkan di atas. Genosida yang ditimpakan kepada orang-orang ini harus dikenang tak kurang daripada yang ditimpakan kepada kaum Yahudi. Penggambaran bahwa kebiadaban Nazi khusus ditujukan kepada kaum Yahudi adalah bagian dari upaya 'mengubah holocaust menjadi alat politik', sebagaimana kami terangkan di muka, dan ini amat salah. Hal ini sejalan dengan buku *The Holocaust Industry* yang ditulis oleh Finkelstein (2000:3—6) yang menganggap kalau peristiwa holocaust ini tidak lain sebagai "tambang uang" bagi negara Israel.

Sejumlah pihak malah ada yang meragukan holocaust seperti versi resminya. Ada yang mempertanyakan sejumlah hal tentang kebohongan holocaust seperti: sejumlah foto korban kematiannya bukan karena pembunuhan kamar gas tetapi karena penyakit types, jumlah korban yang terlalu banyak (6 juta orang) untuk kapasitas kamar gas yang hanya mampu menampung ribuan orang saja, penemuan tentang gas yang hanya berupa obat anti-fungi, dan sejumlah hal lain yang meragukan (Weber, 2012).

Terlepas dari berbagai pro dan kontra tentang holocaust dan pendirian negara Israel, penafsiran tentang holocaust menarik untuk dibicarakan. Bagi Israel dan sejumlah negara pendukung versi resmi holocaust, penafsiran sejarah terhadap peristiwa itu sudah pasti. Tidak ada penafsiran lain. Mempertanyakan apalagi menolak terhadap peristiwa itu adalah sebuah tindak kejahatan, sebuah tindakan anti-semit (yang maknanya dipersempit menjadi anti-Yahudi). Pelakunya bisa dijebloskan ke dalam penjara di Israel atau di dua belas negara yang mendukung hal tersebut.

Pelarangan dan pemenjaraan terhadap penafsiran lain atas versi holocaust jelas-jelas merupakan pertarungan wacana, pertarungan penulisan sejarah, pertarungan bahasa. Tidak diperkenalkannya penafsiran lain atau sekedar mempertanyakan versi resmi holocaust memperlihatkan kalau hal ini merupakan pertarungan kekuasaan. Tentu saja ada sejumlah

konsekuensi yang harus ditanggung baik oleh pemegang otoritas yang berkuasa terhadap versi holocaust ataupun terhadap orang-orang yang menentangnya. Bagi penentang versi resmi holocaust ada yang mengalami pemenjaraan hingga ke pembunuhan. Bagi Israel, jika terbukti holocaust tidak terjadi seperti versi resminya, logika Ahmadinejad yang mempertanyakan keberadaan negara Israel bakal mendapatkan legitimasinya.

-4-

Pilar utama kisah atau versi resmi holocaust didasarkan pada karya sastra, khususnya pada *Catatan Harian Anne Frank*. Dari Wikipedia dipaparkan Annelies Marie "Anne" Frank (12 Juni 1929–Februari/Maret 1945) adalah seorang perempuan Yahudi yang menulis sebuah buku harian ketika ia bersembunyi bersama keluarga dan empat temannya di Amsterdam semasa pendudukan Nazi di Belanda pada Perang Dunia II. Setelah bersembunyi selama dua tahun, kelompok mereka dikhianati dan mereka dibawa ke kamp konsentrasi yang mengakibatkan seluruhnya tewas kecuali Otto, ayah Anne. Otto kembali ke Amsterdam dan dia menemukan buku harian anaknya. Karena yakin akan uniknya catatan tersebut, Otto berusaha mempublikasikannya.

Buku harian tersebut diberikan kepada Anne pada ulang tahunnya yang ketiga belas dan mencatat rentetan peristiwa-peristiwa kehidupan Anne dari 12 Juni 1942 hingga catatan terakhir pada 1 Agustus 1944. Akhirnya buku harian itu diterjemahkan dari bahasa Belanda ke berbagai bahasa dan menjadi salah satu buku yang paling banyak dibaca di dunia. Beberapa produksi teater dan film juga mengangkat tema diary ini. Buku harian yang digambarkan sebagai karya yang dewasa dan berwawasan ini menyodorkan potret kehidupan sehari-hari yang mendalam di bawah pendudukan Nazi; melalui tulisannya, Anne Frank menjadi salah satu korban holocaust yang paling banyak dibicarakan.

Buku inilah yang mengukuhkan kejadian holocaust pada masa Perang Dunia II. Terlepas dari berbagai kontroversi di balik penulisannya, buku ini menjadi dasar untuk membenarkan dan menjadi sejarah penulisan holocaust. Sebagai diary atau catatan harian, tulisan Anne Frank ini sebetulnya berada antara batas fiksi dan realitas. Artinya, yang menjadi dasar penulisan holocaust sebetulnya juga tidak lebih dari karya fiksi (atau setengah sejarah) yang kemudian direproduksi dalam berbagai karya termasuk dalam karya film. Penunjang lain dari peristiwa holocaust adalah karya-karya fiksi semacam film *Schindler's List*.

*Schindler's List*, seperti dipaparkan dalam Wikipedia, adalah film 1993 yang diproduksi berdasarkan novel *Schindler's Ark* karya Thomas Keneally, yang diterbitkan di Amerika Serikat dengan judul *Schindler's List* dan kemudian diedarkan kembali di negara-negara Persemakmuran dengan judul itu pula. Filmnya, yang diadaptasi oleh Steven Zaillian dan disutradarai oleh Steven Spielberg, mengisahkan riwayat Oskar Schindler, seorang pengusaha Katolik Jerman yang berperan dalam menyelamatkan nyawa lebih dari seribu orang Yahudi Polandia pada masa Holocaust. Judulnya merujuk kepada daftar nama dari 1.100 orang Yahudi yang dipekerjakan Schindler di pabriknya dan karenanya tidak dikirim ke kamp-kamp konsentrasi.

Karya-karya fiksi seperti *Catatan Harian Anne Frank* atau film *Schindler's List* setidaknya menjadi pilar utama penulisan versi resmi peristiwa holocaust. Penulisan versi inilah yang

secara hegemonik bahkan seringkali bersifat represif terhadap versi lain. Di sini dapat ditengarai bahwa sebuah wacana sejarah, seperti peristiwa holocaust, dapat ditopang oleh karya sastra atau karya fiksi. Karya-karya semacam *Catatan Harian Anne Frank*, film *Schindler's List*, dan sejenisnya dapat menjadi pelegitimasi sebuah wacana, pelegitimasi sebuah kekuasaan. Dan seperti kita tahu, karya sastra adalah sebuah konstruksi struktur yang dibangun oleh bahasa. Sekali lagi di sini dapat ditarik sebuah simpulan betapa pentingnya peran bahasa dalam mengkonstruksi sebuah kekuasaan. Dalam kasus ini dapat dinyatakan betapa kuasanya bahasa dalam membentuk sebuah wacana, wacana kekuasaan.

-5-

Dalam konteks lain, hal serupa terjadi pada masa abad ke-18 hingga awal abad ke-20 yang dikenal dengan istilah orientalisme. Orientalisme muncul seiring dengan praktik kolonialisme negara-negara Eropa terhadap negara-negara kawasan Asia Afrika dan Amerika selatan. Orientalisme adalah suatu cara untuk memahami dunia Timur, berdasarkan tempatnya yang khusus dalam pengalaman manusia Barat Eropa. Bagi Eropa, Timur bukan hanya dekat; ia juga merupakan tempat koloni-koloni Eropa yang terbesar, terkaya dan tertua, sumber peradaban dan bahasa-bahasanya, saingan budayanya, dan salah satu imajinasinya yang paling dalam dan paling sering muncul tentang "dunia yang lain" (Said, 1994:2).

Lebih lanjut Said (1994:2) menyatakan studi tentang Timur telah membantu mendefinisikan Eropa atau Barat sebagai imaji, idea, kepribadian, dan pengalaman yang berlawanan dengannya. Tidak ada sesuatu pun dari Timur yang bersifat khayalan semata-mata. Timur adalah suatu bagian integral dari peradaban dan kebudayaan material Eropa. Orientalisme mengungkapkan dan menampilkan bagian tersebut secara budaya dan bahkan secara ideologis sebagai suatu *mode of discourse* dengan lembaga-lembaga, perbendaharaan bahasa, studi kesarjanaan, lambang-lambang dan doktrin-doktrin yang mendukungnya, bahkan birokrasi kolonial dan gaya kolonialisme. Pada intinya, seperti yang dinyatakan Said (1994:4), orientalisme adalah gaya Barat untuk mendominasi, menata kembali dan menguasai Timur.

Kajian orientalisme adalah sebuah kajian yang luas, tidak sebatas bahasa yang menempatkan Timur sebagai pihak yang inferior (yang seringkali dianggap kurang beradab atau bahkan biadab) dibandingkan Barat yang superior (yang beradab atau berbudaya lebih tinggi). Seperti telah diungkapkan dalam buku Said, kajian tentang Timur melibatkan berbagai aspek, disiplin, rentang waktu ataupun ruang yang cukup kompleks; suatu kajian yang membedakannya dengan sang subjek, dalam konteks ini adalah Barat. Sejak pembongkaran wacana dominasi Barat di balik studi orientalisme oleh Said, tidak banyak orang yang mengaku dengan predikat sebagai seorang orientalis.

Kajian orientalisme pada dasarnya juga tidak terlepas dari kajian bahasa, mengingat pengantar utama sebagai sebuah kajian adalah bahasa. Oleh karena itu, bahasa juga turut berperan dalam pengenalan, penyebarluasan, dan pendominasian kajian orientalisme sehingga pada masanya pernah menjadi bidang kajian yang cukup terpendang. Tokoh semacam Snouck Hurgronje adalah tokoh orientalis yang cukup terpendang dalam kajian tentang Aceh atau tentang Indonesia. Istilah orientalis kini telah menjadi pejoratif. Sebetulnya, kajian tentang "Timur" hingga kini masih eksis, istilah orientalis atau orientalisme telah digeser menjadi kajian

Asia, kajian Asia Tenggara, kajian Timur Tengah, dan lainnya. Dominasi Barat yang kala itu identik dengan Eropa, kini posisinya juga bergeser ke Amerika Serikat.

-6-

Pertarungan yang masih relatif sengit terjadi pada wacana yang lebih khusus tentang knight templar. Dalam sejumlah kajian, knight templar yang identik dengan kabalalah, iluminati, priory of sion, atau kini dengan freemasonry adalah sebuah kajian yang juga menimbulkan pro dan kontra, khususnya dengan sejarah gereja. Tampaknya bukan fenomena yang lumrah jika kini sejumlah novel atau karya sastra dunia seperti serial karya Dan Brown mulai dari *Angels and Demons*, *The Da Vinci Code*, dan *The Lost Symbol* mengisahkan sebuah cerita yang berlatar belakang tentang iluminati, priory of Sion, dan freemasonry. Novel-novel Brown bersifat membela kelompok-kelompok rahasia ini yang biasanya mendapat stigma negatif oleh pihak gereja atau kelompok agama lainnya.

Selain novel-novel Dan Brown, tema tentang knight templar dan kelompok terkait lainnya juga muncul dalam novel Umberto Eco yang berjudul *Foucault's Pendulum*. Sejumlah tulisan yang bersifat historis tentang kelompok knight templar juga muncul seperti *The Holy Blood and Holy Grail* dan *The Messianic Legacy* karya Michael Baigent, Richard Leigh, dan Henry Lincoln; atau seperti pada buku *The Templar Revelation* karya Linn Picknet dan Clive Prince (yang dapat dibaca dalam bahasa Indonesia). Sejumlah buku Harun Yahya juga mengangkat tentang sepak terjang knight templar. Di Indonesia tulisan tentang hal ini muncul dalam buku *Knights Templar Knights of Christ* karya Rizki Widyaswara, dan sejumlah buku lainnya. Sejumlah film Hollywood turut meramaikan tema tentang knight templar.

Masing-masing pihak, baik yang mendukung knight templar maupun yang menjatuhkannya, sama-sama bersaing dengan menampilkannya dalam sejumlah tulisan, baik sebagai kajian sejarah ataupun karya sastra. Sekali lagi, dalam konteks ini diperlihatkan betapa karya sastra (dan kini juga karya film) menjadi pilihan untuk membentuk wacana. Dalam konteks tertentu, pembentukan wacana itu akan terkait dengan kekuasaan. Karya sastra tidak lain adalah karya seni yang menggunakan bahasa sebagai media utamanya.

Dalam hal ini, kita jadi teringat dengan pembongkaran dominasi teori evolusi (Darwinisme) oleh Harun Yahya dalam sejumlah bukunya yang dapat diunduh dalam <http://www.harunyahya.com>. Dalam hal ini, pengungkapan sejumlah kelemahan teori evolusi adalah sebuah pertarungan epistemologi. Teori evolusi Darwin menurut Yahya tidak lain hanyalah bersifat fiksi belaka, jauh dari sifat ilmiah. Pertarungan ini tidak bisa dilepaskan dari peran bahasa sebagai media untuk mengungkapkan ide-ide atau untuk mengkonter suatu tesis.

-7-

Kebenaran suatu ilmu atau suatu wacana seringkali mirip seperti hakikat suatu kata dalam sebuah bahasa. Seringkali kebenaran suatu ilmu atau wacana, sebut saja seperti kasus teori evolusi Darwin, kajian tentang knight templar, kajian tentang orientalisme, kajian tentang holocaust, atau peristiwa G-30-S 1965/(PKI) pada hakikatnya adalah sebuah "konvensi". Seringkali kelompok tertentu dengan berbagai kekuasaannya bisa membuat suatu peristiwa

atau suatu fakta sejarah menjadi suatu yang bersifat “konvensional” dengan adanya persetujuan dari kelompok mayoritas atau kelompok dominan.

Untuk memperoleh persetujuan dari kelompok lain guna mendapatkan “konvensi kebenaran” tersebut seringkali dibangun dari karya-karya fiksi seperti novel yang tidak lain struktur karya seni yang dibangun dari bahasa. Dari bahasalah kemudian disusun menjadi narasi, bahkan menjadi grand-naratif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2012. *Schindler's List*, [http://id.wikipedia.org/wiki/Schindler%27s\\_List](http://id.wikipedia.org/wiki/Schindler%27s_List). Diakses 25 Mei.
- Anonim. 2012. *Anne Frank*, [http://id.wikipedia.org/wiki/Anne\\_Frank](http://id.wikipedia.org/wiki/Anne_Frank). Diakses 25 Mei.
- Finkelstein, Norman G. 2000. *The Holocaust Industry*. Online edition (<http://www.geocities.com/holocaustindustry/acknowledgments.html>)
- Rosa, John. 2008. *Dalih Pembunuhan Massal Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto* (penerjemah Hersri Setiawan). Jakarta: Institut Sejarah Sosial Indonesia dan Hasta Mitra.
- Said, Edward W. 1994. *Orientalisme* (terjemahan Asep Hikmat). Bandung: Penerbit Pustaka.
- Weber, Mark. 2012. “Is the Holocaust is a Hoax?”, <http://www.biblebelievers.org.au/holohoax.htm>. Diakses 25 Mei.
- Yahya, Harun. 2006. *The Holocaust Violence* (Translated by Carl Nino Rossini). Istanbul: Global Publishing.
- Yusuf, Iwan Awaluddin. 2012. “Pelarangan Buku dan Pemasangan Demokrasi,” <http://bincangmedia.wordpress.com/>, Diakses 1 April.

## Catatan

1. Artikel ini dipresentasikan dalam Konferensi Internasional Kesusastraan HISKI di FBS Universitas Negeri Yogyakarta 7—9 November 2012. (Sebelumnya juga pernah dikirimkan ke acara Seminar Internasional di ITB Bandung, tetapi karena ada penugasan ke Thailand makalah tersebut tidak sempat dipresentasikan.)
2. Nurhadi adalah staf pengajar pada Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, FBS, UNY sejak 1999. Mengajar matakuliah Sejarah Sastra, Kritik Sastra, Kajian Drama, dan lainnya. Menyelesaikan: S1 Jurusan PBSI IKIP Yogyakarta 1995, S2 pada bidang Sastra UGM Yogyakarta tahun 2004, S3 juga bidang Sastra UGM tahun 2010.